SEMINAR NASIONAL LAHAN BASAH
" Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penelitian: Meningkatkan Kehidupan Manusia, Melindungi Lingkungan"
9-10 September 2024
Banjarmasin

PERAN DAN POSISI OPINION LEADER DALAM MENCEGAH MISINFORMASI DAN DISINFORMASI POLITIK DALAM SITUASI PILKADA PADA KELOMPOK KEAGAMAAN PERKOTAAN

Bachruddin Ali Akhmad[a], Sri Astuty[b], Sarwani[c], Muhammad Ainani[d]

[abcd]Universitas Lambung Mangkurat

Email korespondensi: bachruddin_aliakhmad@ulm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi ini bertujuan mengetahui, mendiskripsikan serta menganalisis peran dan posisi opinion leader,dalam mencegah misinformasi dan disinformasi politik menjelang pilkada 2024 di kota Banjarmasin.Target khusus dalam penelitian ini, adalah menemukan tipikal opinion leader dalam mencegah penyebaran hoaks, hambatan yang dialami dalam menjalankan misinya serta usaha opinion leader agar inovasinya tetap suistainable dalam memutus mata rantai penyebaran hoaks dalam platform media yang digunakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi, dan FGD. Melalui teknik dokumentasi diperoleh data data sekunder tentang gambaran lokus penelitian.. Melalui teknik observasi lapangan diperoleh data data primer melalui pengamatan,dan melalui FGD diperoleh data primer yang menjawab permasalahan penelitian. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman. Penelitian yang dilakukan sejalan dengan renstra penelitian ULM, dimana target unggulannya adalah mencetak sumber daya manusia unggul dalam bidang lingkungan lahan basah, menemukan ilmu yang membumi sesuai dengan lingkungan lahan basah, serta kemampuan yang unggul dalam mengelola lahan dilingkungan lahan basah. Penelitian ini berhasil menemukan sebagai berikut: Sebagian dari anggota masyarakat mempunyai karakteristik lebih mudah dipengaruhi oleh misinformasi dan disinformasi serta kurang kritis, misalnya kaum perempuan. Pada pilkada yang berlangsung saat ini, misinformasi dan disinformasi politik yang mulai berkembang antara lain, perempuan haram menjadi pemimpin. Ada beberapa hambatan untuk mengeleminir misinformasi dan disinformasi politik antara lain karena masyarakat dan ulama yang literasinya kurang. Untuk mencegah terjadinya misinformasi dan disinformasi bisa diterapkan keberadaan kegiatan pemberian konsultasi dan penguatan terkait informasi politik, memberitahukan sanksi hukum atas penyebaran misinformasi dan disinformasi. Posisi dan peran opinion leader dalam mencegah misinformasi dan disinformasi adalah pemilter dan melakukan pelurusan. Tipikal opinion leader yang diharapkan bisa melakukan pencegahan misinformasi dan disinformasi punya literasi informasi politik baik, bersertifikat, menguasai pengetahuan dan praktek perundang-undangan terkait.

Kata kunci: Peran, Posisi, Opinion leader, Misinformasi, Disinformasi.

PENDAHULUAN

Keberadaban netizen adalah perilaku bersilancar di dunia maya dan aplikasi media sosial, termasuk risiko terjadinya penyebar luasan berita bohong atau hoak, ujaran kebencian atau hate speech. Terkait dengan keberadaban ini, perusahaan microsolt, melakukan evaluasi yang hasilnya, Indonesia menduduki rangking 29 dalam tingkat keberadaban nitizen dibawah Taiwan dan Singapura (Ardiani, 2021)13. Nitizen yang mempunyai tingkat keberadaban yang rendah ini bisa dibayangkan

bagaimana bila terlibat dalam pemilu dan pilkada.Tentu sangat rawan untuk memunculkan misinformasi dan disinformasi di masyarakat, termasuk di dalam kelompok keagamaan di perkotaan yakni di kota Banjarmasin,khususnya di kecamatan Banjarmasin utara.

Pemilu 2024 merupakan pemilu paling kompleks dalam sejarah Indonesia. Pemilu dilaksanakan dua kali pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPRRI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilihan berlangsung serentak untuk memilih anggota DPD 152 kursi, DPR sebanyak 84 Dapil dan 580 kursi, DPRD Provinsi sebanyak 301 Dapil dan 2.372 kursi, serta DPRD Kabupaten/Kota sebanyak
2.325 Dapil dan 17.510 kursi. Total terdapat 2.710 Dapil dan 20.462 kursi dalam pelaksanaan pemilu Februari 2024. Pada 27 November 2024 ke depan, akan berlangsung Pemilu Kepala Daerah di 545 daerah yang terbagi ke dalam 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota termasuk Pilkada yang saat ini berproses di wilayah kabupaten/kota dan provinsi Kalimantan Selatan.

Kompleksnya penyelenggaraan Pemilu 2024 menjadi tantangan di tengah munculnya berbagai persoalan politik khususnya misinformasi dan disinformasi (hoaks) yang perlu disikapi berbagai pihak. Berdasarkan data laporan pemetaan hoaks Komite Litbang Mafindo bahwa pada bulan November 2023, Tim Pemeriksa Fakta Mafindo menemukan 183 hoaks dengan 132 hoaks bertema politik1. Data hoaks politik ini juga sejalan dengan hasil data Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2024 bahwa terdapat sejumlah 289 hoaks politik2. Berbagai penelitian terkait menguatkan bahwa pada masa prapemilu, hari pemungutan suara, dan pascapemilu terdapat kecenderungan hoaks terkait pemilu akan terus meningkat3. Pengguna internet di Kalimantan Selatan dengan tingkat penetrasi mencapai 71,76% dan hasil identifikasi misinformasi dan disinformasi politik secara nasional mencapai 24,7%, serta banyak menyebar melalui penggunaan internet dengan platform media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp) yaitu mencapai 59,75%4. Selain penyebaran hoaks politik dominan melalui media sosial, juga terdapat penyebaran hoaks politik melalui mulut ke mulut, sehingga membutuhkan antisipasi supaya tidak terjadi polarisasi dan terganggunya kesehatan mental/psikologis.

Penanggulangan misinformasi dan disinformasi politik membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Opinion leader memiliki potensi dalam mengarahkan opini publik termasuk untuk mengarahkan pilihan masyarakat untuk percaya dan tidak percaya pada informasi yang disebarluaskan melalui media sosial dan pertemuan tatap muka. Opinion leader sebagai pemuka pendapat memiliki pengaruh yang kuat dalam memberikan stimulus kepercayaan5,6,7, sehingga opinion leader dapat turut menjadi penentu hoaks politik berkembang dan diserap oleh masyarakat. Penelitian opinion leader dalam mencegah penyebarluasan misinformasi dan disinformasi politik belum banyak dilakukan, sehingga penelitian ini menjadi penelitian celah kebaruan yang berbeda

dengan penelitian sebelumnya dengan fokus pada persoalan hoaks politik dan posisi opinion leader untuk mecegah meluasnya hoaks politik tersebut di masyarakat.

Ada tiga pendekatan untuk menangani misnformasi dan disinformasi (hoaks) yaitu pendekatan teknologi, kedua pendekatan kelembagaan dan ketiga pendekatan literasi. Pendekatan kelembagaan diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Nukman Luthfie (2017) pengamat media sosial meliputi 3 langkah: Pertama penegakan hukum, kedua melibatkan penyelenggara platform, dan ketiga edukasi masyarakat. Untuk yang pertama menangani disinformasi (hoax) dengan menggunakan instrument hukum, seperti undang undang informasi transaksi elektronik (UUITE) dan KUHP. Menurutnya menegakkan hukum terkait dengan penyebaran disinformasi (hoax) dengan menangkap pembuatnya, bukan hanya orang yang menyebarkan kabar tersebut. Langkah kedua melibatkan penyelenggara platform untuk meredam informasi yang tidak benar, bila mereka tidak melakukan langkah tersebut, pemerintah misalnya bisa memberlakukan denda. Ketiga melibatkan masyarakat, yakni mengedukasi mereka untuk melapor bila menemukan disinformasi (hoax) dan pelakunya ke aduankonten@mail.kominfo.go.id dengan menyertakan tautan dan foto gambar tersebut. Selain melalui jalur pemerintah, sekarang ini muncul gerakan masyarakat yang peduli terhadap peredaran berita palsu, antara lain adalah Masyarakat Indonesia Anti Hoax.

Sementara itu pendekatan teknologi yang dilakukan oleh Hernandez, et al. (2002), Guille, A., et al. (2013), Shu, K., et al. (2017), Zubiaga, A., et al. (2018) dan Juditha, C. (2018). Penelitian tersebut mengkaji penanganan hoaks melalui empat orientasi yaitu menganalisis, mendeteksi berita palsu dengan pengecekan fakta, mengidentifikasi karakteristik hoaks dan mempelajari bagaimana hoaks menyebar dengan menilai kredibilitas sumber. Penelitian - penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu menangkap informasi untuk mengidentifikasi ciri-ciri hoaks, namun pendeteksian tersebut tidak menghambat penyebarannya. Guille, A., et al. (2013) melaksanakan pengidentifikasian hoax dengan cara mendeteksi topik populer serta menggunakan teknik pemodelan difusi yang mengidentifikasi penyebar hoax dan pengaruhnya. Tujuan akhir adalah membantu peneliti memahami karya-karya yang ada dan perbaikan informasi, dengan mendefinisikan topik secara lebih tepat. Shu, K., et al. (2017) melaksanakan pengidentifikasian hoax dengan cara mengidentifikasi karakteristik hoax pada teori psikologi dan sosial, algoritma data, matrik evaluasi dan kumpulan data yang representatif, namun belum menjelaskan secara spesifik cara mengurangi penyebaran hoax. Zubiaga, A., et al. (2018) mengembangkan sistem klasifikasi hoax melalui deteksi, pelacakan, klasifikasi sikap dan kebenaran hoax. Tujuan akhirnya untuk mengembangkan sistem klasifikasi hoax, namun tidak termasuk pendeteksian dan penyelesaian hoax.

Kemudian Delmana (2023) masih dalam pendekatan teknologi mengajukan pencegahan disinformasi (hoax) di berbagai kelompok pengguna secara otomatis. Penelitian Delmana ini

memberikan solusi efektif untuk menghentikan penyebaran hoaks pada seluruh kelompok pengguna sosial media melalui Smart Contract Logic (SCL) dan sistem deteksi hoaks otomatis. Metode Smart Contract Logic (SCL) yang menghambat penyebaran hoaks di media sosial di seluruh kelompok pengguna secara otonom dan tanpa perantara dengan mekanisme kecerdasan buatan. Hasil penelitian ini diperkuat oleh Tchakounte, F. (2020) mengungkapkan bahwa SCL mampu memblokir pesan palsu, yang bekerja secara otomatis dan independen dan tidak bergantung kepada otoritas pengawas, sehingga mampu mengurangi penyebarannya. Smart Contract Logic adalah sebuah program yang dapat diotomatisasi oleh komputer, cara kerja program ini melalui pesan/ kode komputer yang tidak dapat dirusak dan disampaikan kepada alamatnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan literasi namun berbeda dengan yang sudah dilakukan pencegahan sebelumnya, pada penelitian ini melibatkan opinion leader sebagai aktor utama yang diliterasi untuk kemudian melakukan pencegahan dalam posisi dan perannya melakukan filter dan pelurusan terhadap disinformasi dan misinformasi yang terjadi pada kelompok keagamaan di perkotaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mendekati objek penelitian untuk mengumpulkan data kualitatif secara holistik. Sehingga data yang didapatkan memiliki kualitas yang tinggi. Pengumpulan data primer dilakukan langsung di lapangan (*field research*), indept interview dan FGD *(Focus Group Discusion)*. Sementara, data skunder dari studi kepustakaan *(library research)*. Melalui observasi lapangan akan diperoleh gambaran peran dan posisi komunikasi opinion leader,karakteristik inovasi yang dibuat opinion leader dalam mencegah penyebar luasan disinformasi dan misinformasi politik, hambatan kultural dan struktural dari lapangan, kemudian melalui indepth interview didapatkan konfirmasi dan data tersebut di atas yang lebih mendalam. Melalui FGD semua data yang sudah terkumpul dari teknik observasi dan indeph interview, di angkat menjadi fokus dalam diskusi untuk direduksi dan didapatkan kesepakatan serta kesimpulan terkait pertanyaan penelitian.

Seluruh gambaran analisis data yang ditemukan dilapangan akan dirangkai menjadi sebuah rekomendasi pembinaan dan dukungan dalam inovasi cegah disinformasi dan misinformasi politik. Penelitian ini dilakukan selama 1 (satu) tahun yang didasarkan pada peta jalan penelitian yang peneliti buat. Untuk melihat keterkaitan perilaku opinion leader terhadap inovasi yang dilakukanya di masyarakat, akan dilihat korelasi di antara kedua variabel.

Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, khususnya di Kecamatan Banjarmasin Utara pada Komunitas keagamaan (majelis taklim, remaja mesjid, ormas keagamaan). Pada lokasi di atas, ditemukan informan kunci yang bisa memberikan informasi dan penjelasan

terkait dengan masalah atau pertanyaan penelitian ini. Waktu pelaksanaan penelitian di lapangan dan di tempat-tempat studi kepustakaan berlangsung selama 1 (satu) tahun.

Variabel penelitian merupakan aspek yang akan dikaji dalam penelitian. Kemudian, dari variabel ini ditemukan indikator. Berdasarkan indikator ini, dibuat panduan teknik pengumpulan data. Dengan menggunakan alat penelitian, dilakukan pengumpulan dari informan dengan menggunakan teknik triangulasi dan FGD *(focus group discussion).*

Sedangkan, variabel yang dipakai untuk membuat panduan pengumpulan data adalah perilaku opinion leader (lihat tabel 1).

Tabel 1.

Variabel, Sumber Data, Alat dan Indikator Capaian

No	Variabel/Aspek	Indikator Capaian	Alat	Sumber Data
1	Peranan dan posisi *opinion leader* dalam mencegah penyebaranluasan hoaks politik, inovasi dan implikasinya.	a. Peranan *opinion leader* dalam cegah Disinformasi dan Misinformasi politik b. Karakteristik *opinion leader* c. Karakteristik inovasi d. Hambatan kultural dan struktural dalam inovasi e. Rekomendasi untuk pihak terkait	a. Panduan observasi *b.* Panduan *indepth interview* c. Panduan FGD	a. *Opinion leader* b. *Dokumen terkait obyek penelitian* c. FGD dari para informan

Sumber : Penelitian tahun 2024

Informan dalam penelitian ini dijadikan sebagai sumber data primer, siapa saja yang memenuhi prosedur teknik pemilihan terpilih sebagai informan. Prosedure atau teknik yang digunakan dalam menentukan informan kali ini adalah teknik kriteria pemilihan informan *(informant selection creteria technique)* yakni pemilihan informan didasarkan pada kreteria tertentu. Pada penelitian ini kreteria tersebut adalah seseorang yang mempunyai posisi sebagai panutan atau rujukan dilingkungan dimana dia berada dan mengetahui data serta informasi terkait peran dan

posisi opinion leader bidang keagamaan islam dalam mencegah

misinformasi dan disinformasi politik pada situasi pilkada tahun 2024 di kecamatan Banjarmasin utara. Kreteria opinion leader dibidang keagamaan di atas ditentukan sebagai syarat informan, karena mayoritas penduduk kota Banjarmasin termasuk di kecamatan Banjarmasin utara mayoritas pemeluk agama islam, dimana peran dan posisi ustadz, remaja masjid, ormas keagamaan berperan dan berposisi strategis ditengah tengah umat islam yang juga mayoritas sebagai pemilih pada pilkada tahun 2024 di kota Banjarmasin.

Didasarkan pada kreteria di atas maka terpilih 4 (empat) orang informan. Keempat informan tersebut adalah: Informan 1 seorang ustadz yang cukup dikenal di kota Banjarmasin berceramah di mesjid mesjid dan di radio da'wah; Informan 2 akademisi perguruan tinggi Islam dan juga pengelola mesjid besar di Kota Banjarmasin; Informan 3 seorang akademisi perguruan tinggi islam dan pimpinan ormas wanita islam yang besar; Informan 4 seorang dosen di Perguruan Tinggi Umum, yang berlatar belakang pendidikan tinggi dibidang agama islam. Berikut ini tabel para informan dan latar belakangnya (Tabel 2).

Tabel 2. Latar Belakang Informan Penelitian

No	Informan	Profession	Additional Profession
1	Informan 1	Pemuka agama	Akademisi, Ketua Lazismu Kota Banjarmasin
2	Informan 2	Ketua Harian Masjid	Akademisi, Staf ahli Gubernur
3	Informan 3	Administrator of an islamic women's organization	Academics
4	Informan 4	Dosen Agama Islam di Perguruan Tinggi Negeri	Koordinator Dosen Mata Kuliah Agama Islam di Universitas Lambung Mangkurat, Guru mengaji

Sumber : Penelitian 2024

Kemudian dari para informan ini diambil dan dikumpulkan data, melalui teknik FGD (fokus group discussion). Data yang terkumpul dikelompokan menjadi 6 kelompok sesuai

dengan permasalahan penelitian, terdiri dari: Karakteristik masyarakat dalam memahami misinformasi dan disinformasi politik; Karakteristik dari misinformasi dan disinformasi politik yang beredar di masyarakat; Hambatan masyarakat untuk memcegah terjebak pada persoalan misinformasi dan disinformasi politik; Strategi yang sudah dilakukan untuk mencegah terjebak pada persoalan misinformasi dan disinformasin politik; Posisi dan peran opinion leader dalam mencegah misinformasi; Tipikal opinion leader sesuai peran dan posisinya serta proses inovasi yang dilakukanna untuk mencegah hoaks dan hambatan yang dialaminya dalam berbagai platform media. Ke 6 (enam) klasifikasi data di atas disampaikan melalui penyajian data pada bagian uraian hasil dan diskusi penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

Karakteristik Masyarakat dalam Memahami Misinformasi dan Disinformasi Politik

Dalam memahami misinformasi dan disinformasi politik menjelang pilkada tahun 2024 ini menurut pendapat informan 3 ada perbedaan antara laki laki dan perempuan. Perempuan dipengaruhi melalui group what app dimana mereka menjadi anggotanya. Berbeda dengan laki laki, maka perempuan lebih mudah dipengaruhi melalui berita berita yang beredar, dan berita berita yang saling dibenturkan satu sama lain. Berbeda dengan diatas informan 1 menilai masyarakat secara umum (bukan hanya wanita) kurang kritis terhadap informasi informasi beredar di media, disebabkan kurang literasi yang menyebabkan mereka misinformasi. Dalam diskusi majelis taklim yang lebih menarik bagi mereka bertanya tentang ekonomi syariah, bukan masalah politik.

Terkait dengan pilkada informan 3 melihat pemilih perempuan tidak terbiasa menentukan secara mandiri dalam menentukan pilihan mereka tergantung suaminya. Kesadaran keikutsertaan politik masih kurang, hal ini memudahkan munculnya misinformasi. Terkait dengan posisi keagamaan, bisanya perempuan juga berpatokan pada pendapat habib, ulama dan syariah. Sehubungan dengan yang disebutkan terakhir mereka lebih mudah terserang disinfomasi dan misinformasi. Ulama laki laki sebagai opinion leader dan pemilih tidak suka berbicara politik di majelis, padahal posisi mereka strategis.

Hal diatas disepakati oleh informan 4 kebanyakan ulama di pilakada yang lalu menghindarkan diri dari masalah politik misalnya menutup pengajian beberapa bulan sebelum dan selama berlangsung dan berakhirnya pilkada, tidak berkenan berphoto bersama dengan para calon dipilkada dan sebagainya. Meskipun demikian ada juga ulama yang justeru menshare ke group wa gambar dan pesan calon pilkada tertentu agar dipilih anggota group. Alasanya mengapa ulama tersebut aktif mengkomunikasikan politik, kalau kita tidak peduli politik nanti oranglain bisa mengarahkan kepada arah yang salah.

Hasil penelitian menunjukkan karakteristik perempuan lebih mudah dipengaruhi oleh misinformasi dan disinformasi serta kurang kritis. Hal ini bisa dipahami selain sifat perempuan dasar perempuan yang lebih mudah dikuasai perasaan ketimbang rasionya. Sementara karakteristik sebagian ulama menghindarkan diri dari politik; barangkali hal ini terjadi karena pengalaman di masa lalu, ulama yang terlibat politik tertentu akan dihukum oleh jemaah dengan meninggalkan pengajian ulama tersebut.

Karakteristik dari misinformasi dan disinformasi politik yang beredar di masyarakat

Karakteristik dari misinformasi dan disinfomasi politik yang beredar di masyarakat ada dua orang informan yang berpendapat yaitu informan 1 dan informan 3 . Informan 1 berpendapat disinformasi dan misinformasi yang muncul dikancah pilkada kali ini (2024) adalah perempuan haram menjadi pemimpin. Kesalahan informasi ini ditujukan untuk membentuk opini publik, agar para pemilih tidak memilih salahsatu pasangan calon gubernur propinsi kalimantan selatan yang seorang perempuan. Selain senada dengan pendapat informan 1 di atas, maka informan 3 juga mengatakan disinformasi dan misinformasi juga mengangkat informasi salah terkait dengan IKN yang dinilai gagal; informasi tentang salah seorang mantan presiden yang diinformasikan dimasa pemerintahannya banyak menjual aset nasional, bahkan dinilai oleh para ahli aset tersebut dijual dengan harga yang murah. Pada situasi pilkada saat ini, misinformasi dan disinformasi politik yang mulai berkembang antara lain, perempuan haram menjadi pemimpin. Munculnya informasi negatif tidak terlepas dari bermunculannya calon calon kepala daerah Perempuan dipilkada propinsi Kalimantan selatan, pilkada walikota Banjarbaru dan pilkada kota Banjarmasin.

Hambatan Masyarakat untuk membedakan misinformasi dan Disinformasi

Informan 4 melihat majelis taklim sebagai salahsatu tempat yang strategis untuk mengedukasi masyarakat pemilih agar bisa membedakan misinformasi dan disinfomasi politik. Namun tujuan ini tidak tercapai, hal ini ditunjukan pada hasil observasi yang dilakukan sejumlah mahasiswa yang ditugaskan menghadiri beberapa majelis taklim di kota Banjarmasin. Konten yang dibahas pada majelis majelis tersebut perihal fiqih, akhlak dan tasauf . Tidak ada satupun yang membahas topik pilkada yang tahapannya sudah berjalan. Jadi ulama menghindari/memisahkan diri/ apatis terhadap masalah politik. Karena itu kalau ada hoaks yang dikirimkan ke group ulama, tidak ada tokoh ulama yang memverifikasinya. Selain itu hambatan untuk membedakan kesalahan informasi dan hoaks tersebut disebabkan masyarakat dilingkungan pesantren punya tokoh kiai atau ulama yang merupakan panutan yang punya ciri khas yakni selalu diikuti. Disamping itu masyarakat mempunyai informasi pembanding dari media.

Informan 1 melihat masyarakat di kalimantan selatan masih memiliki pendidikan literasi politik yang kurang, sehingga menyebabkan munculnya misinformasi, kemudian masyarakat

langsung menyebarkan informasi salah yang diterimanya tanpa memfilter terlebih dahulu. Contoh misinformasi terkait dengan pemahaman haramnya wanita sebagai pemimpin, hadistnya betul tetapi pemahamanya yang keliru. Hadist tersebut muncul karena wanita pada waktu itu masih terkebelakang misal dalam Pendidikan. Ada beberapa hambatan untuk mengeleminir misinformasi dan disinformasi politik antara lain karena masyarakat dan ulama yang literasinya kurang. Hal ini dikarenakan masyarakat yang menganggap politik tidak penting, pentingnya hanya sebatas suara yang dimilikinya bisa dijual menghasilkan uang, jadi politik bagi mereka sekedar transaksi.

Strategi Mencegah Misinformasi dan Disinformasi

Menurut informan 3 informasi politik yang salah mudah terimbas pada calon maupun pemilih Perempuan. Namun Perempuan di Kalimantan selatan rata rata berpikiran terbuka, sehingga mudah diarahkan, sekalipun mereka berstatus Ibu rumah tangga (IRT). Strategi yang dilakukan pada muslimat NU dengan menyediakan konsultasi, sehingga warga muslimah NU (Nahdlatul Ulama) bisa bertanya atau berkonsultasi jika ada di antara mereka yang terpapar hoaks, misinformasi atau disinformasi. Langkah awal yang dilakukan dengan melihat seperti apa kasus yang ada, apakah pimpinan yang langsung mengatasi masalah tersebut. Pada waktu waktu tertentu bisa juga dilakukan pemberian pencerahan/konsultasi oleh sekretaris atau anggota pengurus lainnya disesuaikan dengan kasusnya.

Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan, seperti yang sudah terpapar hoaks, misinformmasi dan disinformasi diberikan penguatan politik dengan pemberian informasi politik yang benar, melalui pantun pantun yang disampaikan. Pencerahan dan penguatan juga dilakukan melalui pertemuan bulan dengan memperhatikan/memelihara ' irama' agar tidak jenuh. Ada muslimat NU yang aktif, akan terbina dengan baik, bisa berpikir mandiri dan rasional dalam sikap dan pilihan politik. Misalnya untuk memilih calon laki laki atau perempuan dalam pilkada.

Sementara itu menurut informan 2 strategi yang dilakukan oleh pengelola mesjid pemerintah dengan memberitahukan agar materi yang disampaikan pada khotbah, ceramah oleh para ulama/penceramah tidak boleh menjelek jelekan pemerintah, tidak berbicara sara atau menyudutkan seseorang atau pihak tertentu. Selain itu disampaikan juga kepada para narasumber tersebut pandangan hukum dan UU ITE terhadap penyebar hoaks,misinformasi dan disinformasi. Menurut aturan tersebut orang yang menerima informasi kemudian meneruskan melalui media lain, maka dianggap turut menyebarkan. Untuk masyarakat disampaikan melalui radio mesjid . Untuk pengisi di radio siaran diberikan juga rambu rambu antara lain, komunikator tidak boleh dari parpol, materi yang disampaikan menyejukan umat selebihnya sama dengan rambu rambu untuk materi khotbah/ceramah. Untuk mencegah terjadinya misinformasi dan disinformasi bisa diterapkan keberadaan kegiatan pemberian konsultasi dan penguatan terkait informasi politik, memberitahukan

sangsi hukum atas penyebaran misinformasi dan disinformasi. Hal ini sejalan dengan tingkat literasi informasi politik yang rendah di berbagai lapisan masyarakat.

Posisi dan Peran Opinion Leader dalam Mencegah Misinformasi dan Disinformasi

Pada penelitian ini terpilih karakter informan yang menduduki unsur pimpinan dalam organisasi masing masing yang juga berkarir sebagai akademisi. Informan 1 seorang ustadz yang memberikan ceramah di majelis taklim pada mesjid mesjid muhamadiyah yang ada di kota Banjarmasin, dan kadang kadang juga berceramah di beberapa kota berbagai kabupaten di Kalimantan selatan. Selain itu yang bersangkutan juga menjadi unsur pimpinan di Lazismu (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah) Kota Banjarmasin. Terkait peran dan posisi opinion leader dia berpendapat seorang opinion leader harus bisa memfilter terlebih dahulu informasi informasi keagamaan yang masuk ke dalam organisasinya. Bagaimana opinion leader menyaring informasi yang masuk ke organisasinya, serta bagaimana caranya memberikan pencerahan kepada masyaraka yaitu dengan menginformasikan dan menjelaskan sebagaimana Al Qur'an dan hadist mengajarkan langkah langkah yang dilakukan, yakni' tabbayyun' terlebih dahulu dalam menyaring informasi.

Informan 2 menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengelola Mesjid Pemerintah, saat ini informan 2 menjabat sebagai salahsatu Staff Ahli Kepala Daerah, serta tercatat sebagai dosen pada salah satu Perguruan Tinggi Negeri Agama Islam. Menurutnya, ulama harus memiliki etika yang didasari dari pendidikan agama yang sudah dimiliki, terkait dengan pengelolaan mesjid harus mencegah materi yang mengandung sara, menjelek jelekan pihak lain, atau mengandung mis dan disinformasi.

Informan 3 seorang Ketua Muslimat NU (Nahdlatul Ulama) Kalimantan selatan, saat ini juga tercatat sebagai dosen pada salah satu Perguruan Tinggi Islam Negeri. Posisi dan peran opinion leader seperti di organisasi yang dipimpinnya adalah mencegah dan meluruskan hoaks, disinformasi dan misinformasi. Posisi dan peran opinion leader dalam mencegah misinformasi dan disinformasi adalah pemilter dan melakukan pelurusan. Namun posisi dan peran ini, belum bisa dilakukan mengingat sebagian opinion leader sendiri belum mengetahui dengan baik informasi politik, perundang undangan terkait.

Tipikal Opinion Leader dan Inovasi Pencegahan Misinformasi dan Disinformasi.

Menurut informan 1 kemungkinan adanya perubahan dari opinion leader untuk mengajak masyarakat lebih berani dengan pendapatnya, dan tidak melakukan hal hal yang negatif masih memungkinkan. Hal ini bisa dilakukan dari bagaimana kita memberikan literasi terutama pada opinion leader disamping masyarakat. Menurut informan 2, selain literasi kepada opinion leader, juga diperlukan sertifikasi penceramah. Materi sertifikasi meliputi undang undang ITE, UU penyiaran, UU Pers, etika komunikasi serta pengetahuan peta karakteristik masyarakat yang rawan.

Menurut informan 3 dia setuju dengan pendapat informan 2, dan tokoh tokoh bisa

dipertegas. Materi sertifikasi meliputi sosiologi, etika komunikasi, dan geografi untuk bisa memetakan karakteristik masyarakat. Sedangkan informan 4 setuju sertifikasi penceramah, meningkatkan peran publik figur, karena masyarakat melihat siapa yang berbicara. Tipikal opinion leader yang diharapkan bisa melakukan pencegahan misinformasi dan disinformasi punya literasi informasi politik baik, bersertifikat, menguasai pengetahuan dan praktek per undang undangan terkait. Tipikal di atas lebih sebagai harapan inovasi dalam mencegah dan memerangi hoaks, misinformasi dan disinformasi.

KESIMPULAN

Dari data yang terkumpul, disajikan dan dianalisis penelitian mendapatkan kesimpulan:

1. Hasil penelitian menunjukkan sebagian dari anggota masyarakat mempunyai karakteristik lebih mudah dipengaruhi oleh misinformasi dan disinformasi serta kurang kritis**,** misalnya kaum perempuan.
2. Pada pilkada yang berlangsung saat ini, misinformasi dan disinformasi politik yang mulai berkembang antara lain, perempuan haram menjadi pemimpin.
3. Ada beberapa hambatan untuk mengeleminir misinformasi dan disinformasi politik antara lain karena masyarakat dan ulama yang literasinya kurang.
4. Untuk mencegah terjadinya misinformasi dan disinformasi bisa diterapkan keberadaan kegiatan pemberian konsultasi dan penguatan terkait informasi politik, memberitahukan sanksi hukum atas penyebaran misinformasi dan disinformasi
5. Posisi dan peran opinion leader dalam mencegah misinformasi dan disinformasi adalah sebagai penyaring dan melakukan pelurusan.
6. Tipikal opinion leader yang diharapkan bisa melakukan pencegahan misinformasi dan disinformasi punya literasi informasi politik baik, bersertifikat, menguasai pengetahuan dan praktek per undang undangan terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Adiani,E.R.F.et al (2021) "Kesantunan Berkomunikasi pada Media sosial di Era Digital", *Sultan Agung Fundamental Research Journa*l, 2 (2), PP 65 – 76 Available at http://jurnal.ac.id/Index.php/safrj/article/view/17981

Akhmad, Bachruddin Ali & Sarwani (2022). Peranan Komunikasi *Opinion Leader* Pada Jaringan Komunikasi Pedagang Meubel di Kabupaten HSU pada Situasi Pandemi

Amilin. (2019). Pengaruh Hoaks Politik dalam Era Post-Truth terhadap Ketahanan Nasional dan Dampaknya pada Kelangsungan Pembangunan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*. 5-12. Edisi 39, September 2019

APJII. (2024). Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024. Laporan Survei: Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia

Colville, I., & Carter, M. (2012). Innovation and Change in Public Services. In L.
Brown & S. P. Osborne (Eds.), Handbook of Innovation in Public Services. Cheltenham: Edward Elgar Publishing

Delmana,Latipraja (2003) *Electoral governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol 4 no 2, mei 2023, www.journal.kpu.go.id.hal 193 – 194.

Fahmi, Yusron. (2024, Pebruari 28). Kominfo: 289 Hoaks Beredar Selama Pemilu dari Januari 2023 hingga Januari 2024 diakses dari https://www.liputan6.com/surabaya/read/5538153/kominfo-289-hoaks-beredar- selama-pemilu-dari-januari-2023-hingga-januari-2024

Leeuwis C. (2009). Komunikasi untuk Inovasi Pedesaan. Penerbit Kanisius: Yogyakarta Liana

Technologies. (2020, June 17). *Key* Opinion Leaders: Who Are They and Why DomThey Matter? Retrieved from Liana Technologies.

Mafindo. (2023). Pemetaan Hoaks Politik. Laporan Pemetaan: Litbang Masyarakat Anti Fitnah Indonesia

Oktarina,S & Sarwoprasodjo, S. (2018). Strategi Komunikasi Politik Opinion Leader dalam Difusi Program Pembangunan dan Pengembangan Lembaga Lokal di Pedesaan. *MetaCommunication; Journal Of Communication Studies* 78-90 p-ISSN: 2356-4490 Vol 3 No 1 Maret 2018

Syahara, T.A et.al (2021). Komunikasi Bencana Melalui *Opinion Leader*. *Komuniti**: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*** 102-111 Vol. 13, No. 2, September 2021 p- ISSN: 2087-085X e-ISSN: 2549-5623

Yuanita, D. (2021). Peran Key Opinion Leader dalam Strategi Public Relations pada Komunikasi Krisis Perusahaan. *PRofesi Humas***,** Volume 6, No. 1, 2021, hlm. 23-44 ISSN: 2528-6927 (printed), ISSN: 2541-3678 (online). Website: http://jurnal.unpad.ac.id/profesi-humas

Yuditha,C (2018) Interaksi Komunikasi Hoaks di Media Sosial serta Antisipasinya. *Jurnal Pekomnas*, 3 (1), 33 – 44 http://tekno.tempo.co/read/news/2017/01/22/072838600/3 - langkah penting untuk memerangi hoax.

Zhao, F., & Kong, Y. (2017). Discovering Social Network Key Opinion Leader Based. *International Journal of Management and Applied Science*, 43-49.